



# SISTEM PERINGATAN DINI INFLASI SUMBAWA (SI ANDINI SUMBAWA)

Oleh:

**ANDI KUSMAYADI (andiisme@gmail.com)**

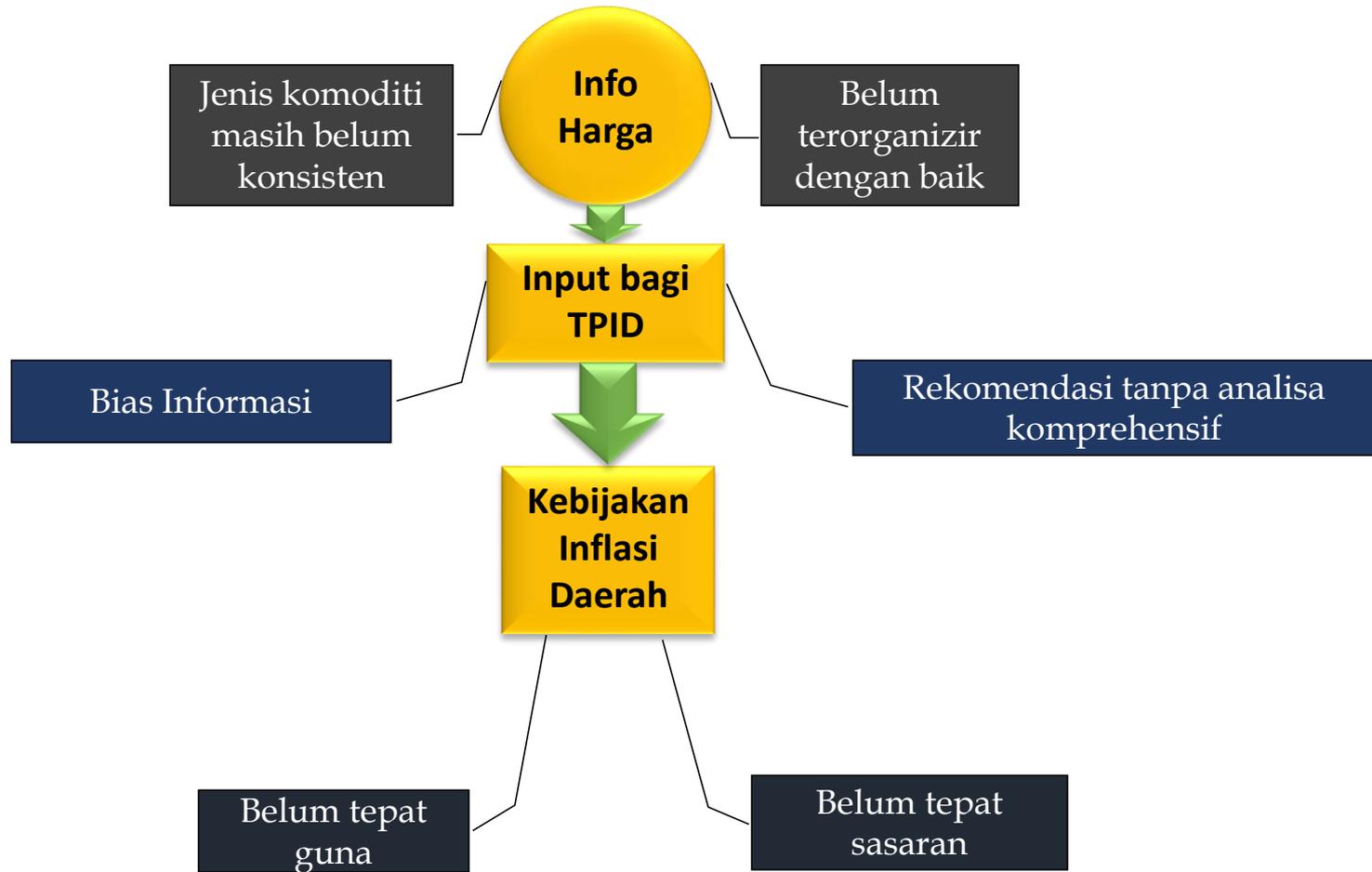
**Peserta Kompetisi eNTeBeNOVIK 2018**



**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI NTB 2018**

**Mataram, 26 November 2018**

# LATAR BELAKANG “SI ANDINI”



1. Pemda menjadi tidak responsif dan tidak antisipatif terhadap fluktuasi harga;
2. Daya beli masyarakat menurun;
3. Produktifitas masyarakat menurun.

**Dibutuhkan *Acceleration Engine* berupa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decisions Support System (DSS)***

# TUJUAN & MANFAAT DSS “SI ANDINI”

## TUJUAN

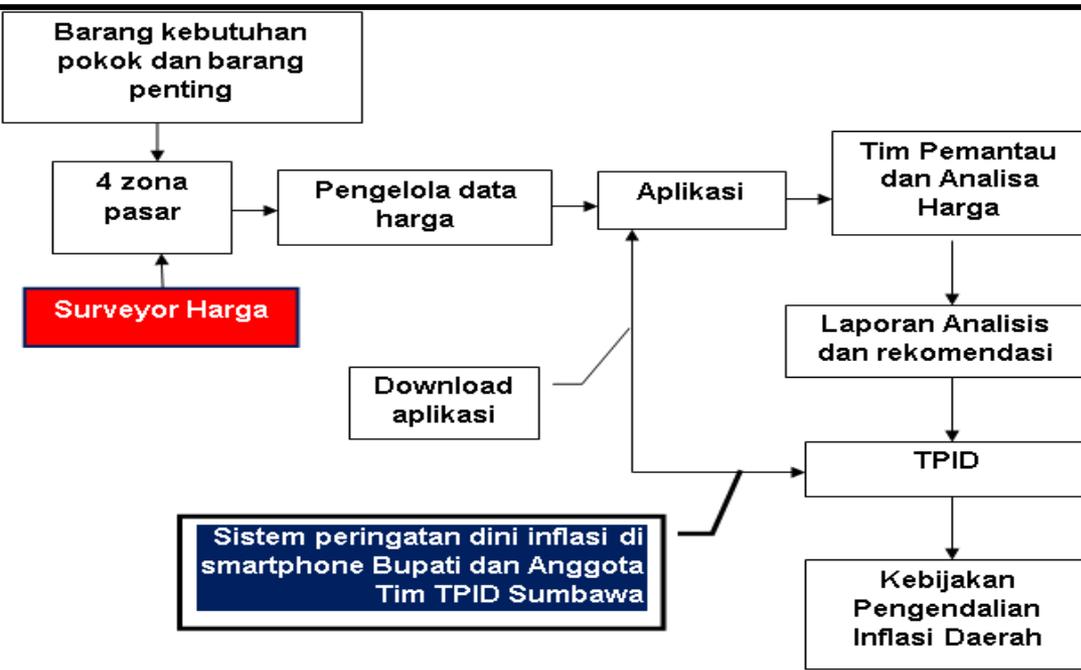
**#1** Mewujudkan TPID yang responsif melalui sistem peringatan dini (*early warning system*) inflasi dalam rangka menghasilkan kebijakan dan langkah antisipatif, kuratif dan preventif bagi kepentingan publik.

**#2** Menghasilkan analisa dan rekomendasi yang komprehensif tentang inflasi untuk digunakan sebagai referensi bagi TPID dalam mengambil pilihan-pilihan keputusan.

## MANFAAT

1. Tersedianya *data base* harga real time bagi perkembangan harga di Sumbawa;
2. Tersedianya analisis harga dan peramalan terhadap trend harga yang komprehensif dalam pengukuran WtW, MtM, dan YoY;
3. Tersedianya rekomendasi berdasarkan info harga real yang diklasifikasikan berdasarkan kawasan;
4. Tersusunnya kebijakan yang antisipatif, kuratif, dan preventif bagi kepentingan publik yang tepat sasaran dan tepat guna;
5. Terlaksananya edukasi dan literasi inflasi bagi publik;
6. Tersedianya referensi pasar bagi swasta;
7. Sumbawa bisa muncul sebagai TPID terbaik nasional;
8. Tersedianya referensi teknokratik bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran APBD.

# ARSITEKTUR DSS SI ANDINI



## Titik Kritis & Risiko:

Pada Surveyor Harga. Tingkat validitas, derajat kepercayaan, dan kesesuaian waktu sangat menentukan kinerja tim dan output sistem.

Jika risiko terjadi, dampaknya adalah *garbage in-garbage out*

SOP, mekanisme, proses survey dan arus informasi menjadi instrument pengendalian meminimalisir risiko

Analisis dan Rekomendasi tepat guna dan tepat sasaran

Bupati dan TPID menghasilkan kebijakan yang tepat guna & tepat sasaran dalam rangka pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan

## Nama Aplikasi:

Sistem Peringatan Dini Inflasi (Si Andini) Sumbawa

## Peran:

Sistem Pendukung Keputusan (*Decisions Support System*)

## Keunikan:

Langsung ke Pusat Pengambil Kebijakan Daerah

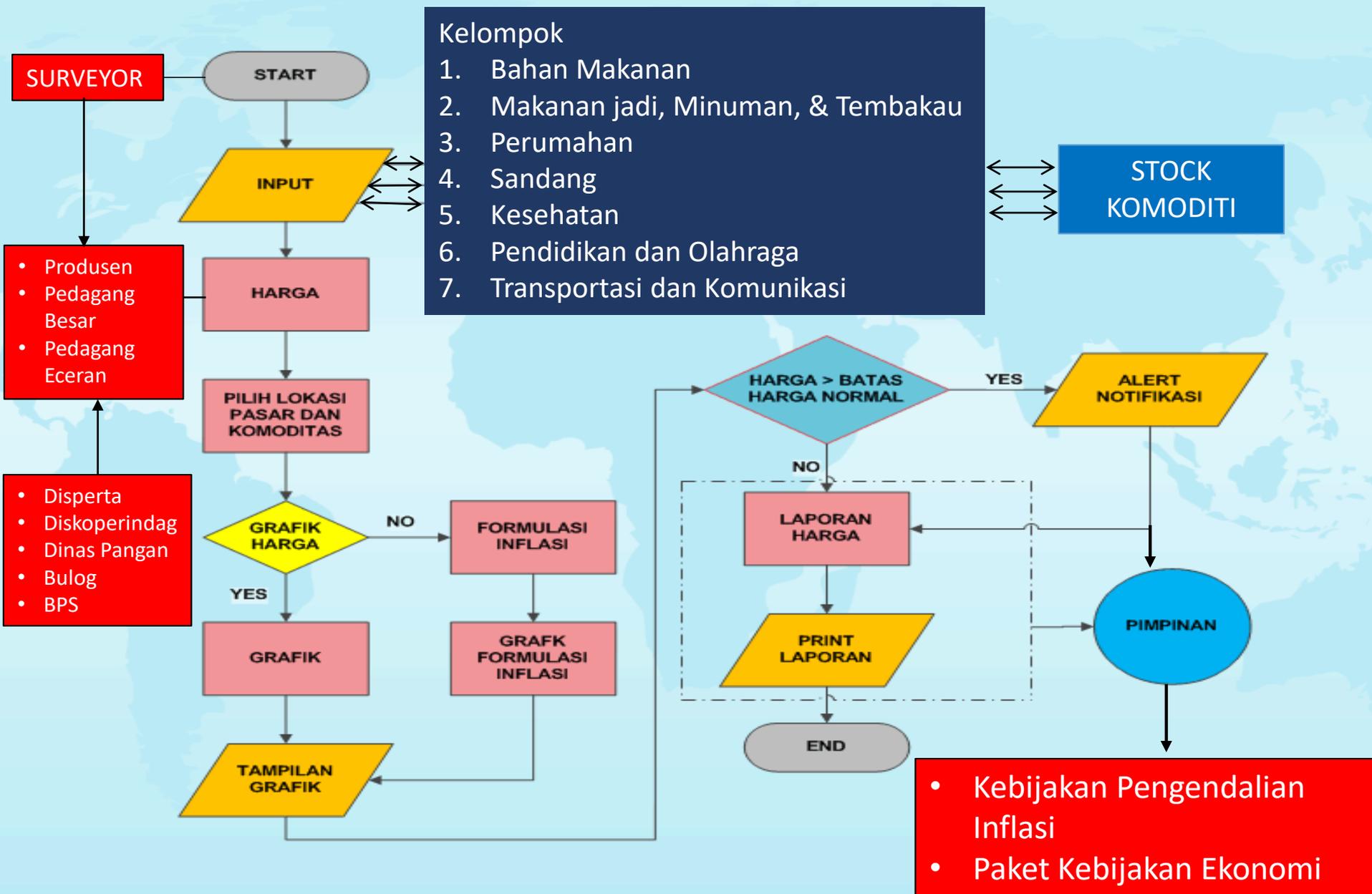
## Keunggulan:

1. Analisis & Rekomendasi lebih cepat, tepat dan mudah;
2. Meminimalisir human error pada proses pengolahan data;
3. Dapat Diintegrasikan dengan data dari BPS dan Bulog;
4. Pemetaan perekonomian per kawasan berdasarkan jangkauan pasar;
5. Responsif, Efektif dan Efisien

# PERANCANGAN SISTEM PERINGATAN DINI INFLASI SUMBAWA (SI ANDINI SUMBAWA)

Kelompok

1. Bahan Makanan
2. Makanan jadi, Minuman, & Tembakau
3. Perumahan
4. Sandang
5. Kesehatan
6. Pendidikan dan Olahraga
7. Transportasi dan Komunikasi



- Kebijakan Pengendalian Inflasi
- Paket Kebijakan Ekonomi

# PELAKSANAAN DAN PENERAPAN DSS “SI ANDINI”

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PEMANTAUAN DAN ANALISA PERKEMBANGAN HARGA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan besarnya honorarium Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- melakukan pemantauan harga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komoditi yang akan dipantau berdasarkan Klasifikasi Baku Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia (KBPRI) dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
  - menentukan jenis komoditi barang dan jasa yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa dan menjadi objek pemantauan secara berkala;
  - mengembangkan informasi komoditi di Kabupaten Sumbawa;
  - menganalisis informasi perkembangan harga;
  - menyusun rekomendasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan analisa perkembangan harga di Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa;

## SK Bupati Sumbawa Nomor 187 & 201 Tahun 2018



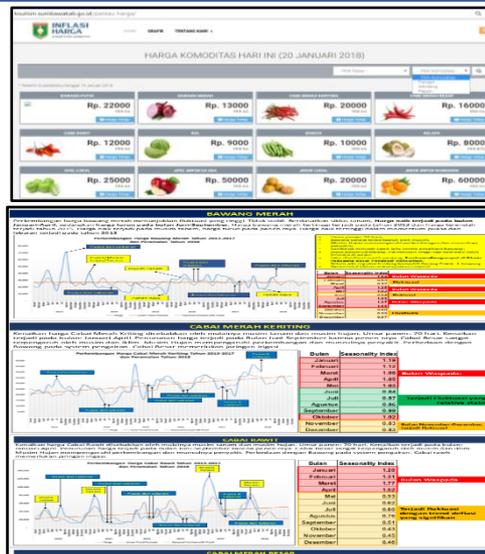
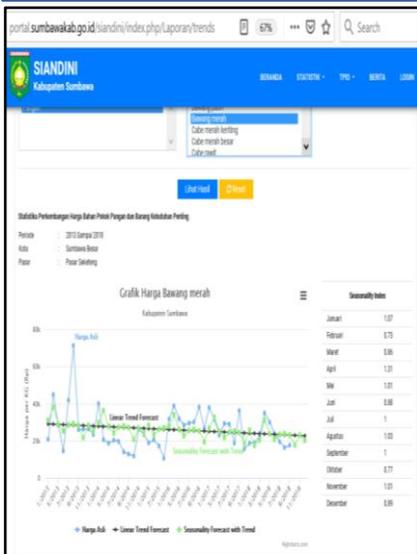
Rapat Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan harga. Merupakan tindak lanjut hasil rakor tanggal 26 September 2017



- Menyepakati *Job Description* Tim;
- Menyepakati SOP informasi harga melalui system aplikasi;
- Menyepakati pengelompokan dan jenis komoditi objek pemantauan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa



Membangun DSS “Si Andini” sesuai dengan Perancangan Sistem dan kesepakatan Tim

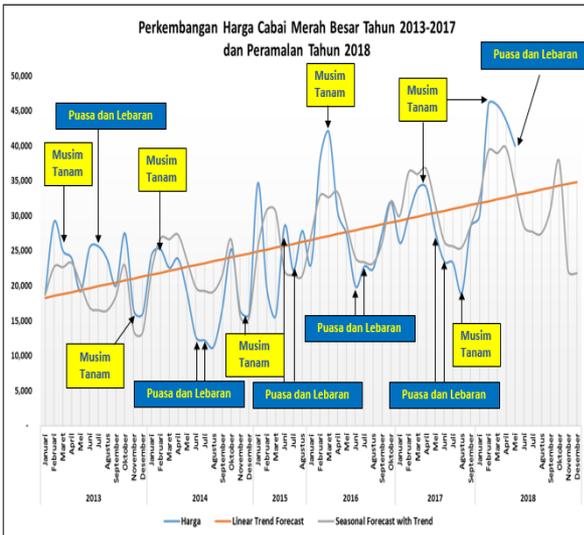


# PELAKSANAAN DAN PENERAPAN DSS "SI ANDINI"



## CABAI MERAH BESAR

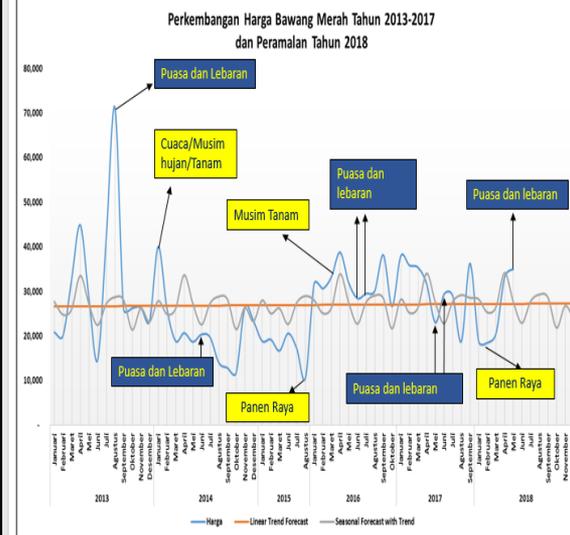
Kenaikan harga Cabai Merah Besar (Cabai Besar) disebabkan oleh mulainya musim tanam dan musim hujan. Umur panen: 70 hari. Kenaikan terjadi pada bulan: Januari-Maret. Penurunan harga terjadi pada Bulan Juni-September karena panen raya. Cabai Besar sangat terpengaruh oleh musim dan iklim. Musim Hujan mempengaruhi perkembangan dan munculnya penyakit. Perbedaan dengan Bawang pada system pengairan. Cabai Merah Besar memerlukan jaringan irigasi, tidak sumur bor.



Bulan	Seasonality Index	Kategori
Januari	1.02	Bulan Waspada
Februari	1.22	
Maret	1.20	
April	1.22	Terjadi Fluktuasi yang relative stabil
Mei	1.04	
Juni	0.86	
Juli	0.83	Bulan Waspada:
Agustus	0.82	
September	0.91	
Oktober	1.10	Bulan November-Desember, terjadi fluktuasi
November	0.64	
Desember	0.63	

## BAWANG MERAH

Perkembangan harga bawang merah menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Tidak stabil. Berdasarkan siklus tanam, **Harga naik terjadi pada bulan Januari-April**, sedangkan **harga turun pada bulan Juni-September**. Harga bawang merah tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan harga terendah terjadi tahun 2015. Harga naik terjadi pada musim tanam, harga turun pada panen raya. Harga naik tertinggi dalam momentum puasa dan lebaran terjadi pada tahun 2013



- Umur panen: 70 hari;
- Bawang sangat terpengaruh oleh musim.
- Musim Hujan mempengaruhi perkembangan dan munculnya penyakit;
- Sumbawa menjadi salah satu sentra penghasil bawang;
- Stock belum seimbang, Permintaan tinggi tapi komoditi tidak tersedia di pasar;
- Jalur distribusi masih panjang: Produsen-Pengumpul di Bima-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen.
- Belum ada regulasi tentang komoditi Bawang Pokok → bawang
- Petani lokal belum mendapatkan insentif.

Bulan	Seasonality Index	Kategori
Januari	1.04	Bulan Waspada
Februari	0.93	Fluktuasi
Maret	0.97	
April	1.26	Bulan Waspada
Mei	1.02	Fluktuasi
Juni	0.84	
Juli	1.02	Bulan Waspada
Agustus	1.07	
September	1.05	Fluktuasi
Oktober	0.80	
November	0.98	
Desember	0.87	

# PELAKSANAAN DAN PENERAPAN DSS "SI ANDINI"

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
 Jalan Garuda No. 1 Telo, (0371) 21582 - Fax: (0371) 25675 Sumbawa Besar

**KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**  
 Sumbawa Besar, 26 September 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa. Setelah membacakan Laporan Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga serta pembahasan dan rekomendasi Tim TPID, Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumbawa menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Perencanaan sebagai Ketua Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga merencanakan Surat Edaran Bupati Sumbawa atas bentuk regulasi daerah lainnya yang dipandang efektif dalam rangka pengendalian dukungan dan partisipasi seluruh komponen pembangunan (PMDa-Swasata-Komunitas Masyarakat-Perguruan Tinggi-PSN) di Kabupaten Sumbawa terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi melalui penetapan dan perhatian cakupan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau strategi lain yang bertujuan mewujudkan Sumbawa Berdaulat Pangan. Target selesai pada minggu II Oktober 2018.
2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa mengkoordinasikan implementasi kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.
3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya inflasi terhadap beberapa barang pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 bersama OPD terkait yang meliputi:
  - a. Ketersediaan;
  - b. Ditunjangi sistem logistik; dan
  - c. Peluang kerjasama dengan daerah lain melalui optimalisasi peran BEMD.
4. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa mengkoordinasikan implementasi kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.
5. Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga melaksanakan pengamatan dan pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) sebagai sistem pendukung keputusan (SPK) TPID Kabupaten Sumbawa yang kredibel dan akurat.
6. Rencana tindak lanjut implementasi kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 5 di atas diadukan kepada Bupati Sumbawa sekaligus Ketua TPID melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selanjutnya Pelaksana Harian TPID Kabupaten Sumbawa.
7. Rapat Koordinasi TPID berikutnya digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap progress pelaksanaan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 5 kesepakatan ini.

Page 5 of 8

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Garuda No. 1 Telo, (0371) 21582 - Fax: (0371) 25675 Sumbawa Besar

**NOTA DINAS**  
 Nomor: 100/646/2018/E/KON/2018

Kepada Yth. : Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID  
 Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pelaksana Harian TPID  
 Tanggal : 24 Oktober 2018  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Dengan hormat,

Bahwa penyelenggaraan pengendalian harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Hocostrum Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Hocostrum Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Bahwa kedua tim tersebut di atas beresam dalam pengendalian harga Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga (TPAPH) pembantuannya adalah Asisten Perencanaan dan Pembangunan, tentunya adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Analisis perkembangan harga OPD-OPD terkait. Pekejaannya melakukan pemantauan dan analisis perkembangan harga TPAPH diposisikan sebagai tim dan sistem pendukung keputusan bagi TPID dengan rekomendasi kebijakan diajukan ke TPID. Selanjutnya, TPID menyetujui rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada Bupati Sumbawa.

Pembentukan TPAPH berminat dari evaluasi terhadap peran dan fungsi TPID Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekda selaku Sekretaris TPID pada tanggal 26 Oktober 2017. Rapat evaluasi tersebut memberikan evaluasi serta pada saat kelola TPID Sumbawa sebagai forum pengamatan dan integrasi sistem dalam pengendalian harga TPID sebagai perlu ada sinergitas dan terintegrasi sistem dalam pengendalian harga TPID menjadi forum yang efektif dan bermanfaat. Evaluasinya, TPID adalah forum yang strategis, rasional misin kebijakan pengendalian harga.

Hasil evaluasi itu akhirnya menghasilkan adanya inovasi dalam tata kelola TPID yang menekankan pengambilan keputusan dan kebijakan pengendalian harga yang diaktikan menggunakan pengamatan dan informasi keputusan yang akurat dan informasi yang dapat dipercaya sebagai faktor pembentuknya, baik sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur daerah. Inovasi ini diadukan menjadi sistem yang terintegrasi dalam pengendalian data dan program yang ada di seluruh OPD terkait.

Bagian Perencanaan Sekda yang mengawasi urusan inflasi daerah membuat inovasi dan diadukan ke lembaga inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa. Inovasi ini bernama SIANDINI. Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi.

TPAPH menjadi harga dibentuk oleh banyak faktor. Faktor produksi, transportasi, kebijakan pemerintah, penanaman dan penawaran, dolar amerika dan faktor-faktor sosial lainnya. Faktor-faktor inilah yang akan diadukan terhadap harga-harga barang yang dipantau. TPAPH secara khusus ingin membangun tata kelola TPID yang baik, yang kredibel, dan yang akurat di daerah. Harapannya, harga-harga stabil, maka dapat terikat perkembangan harga dapat diprediksi dan kesinambungan masyarakat meningkat.

dan menginformasikan secara teratur dan terprogramnya ke TPID. SIANDINI terdiri dari 2 (dua) instrumen: tim survey yang menjadi bagian dalam TPAPH dan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, SIANDINI sebagai sebuah inovasi berperan sebagai Sistem Pendukung Keputusan. SIANDINI diharapkan dapat memberikan peringatan untuk melakukan antisipasi dan melaksanakan pengendalian harga yang tepat sasaran dan tepat guna.

Berdasarkan rangkain rapat koordinasi yang telah dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagaimana terlampir dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan objek barang yang akan dipantau oleh TPAPH sesuai hasil rapat koordinasi tanggal 18 April 2018 yang selanjutnya ditetapkan setiap tahun;
2. Hasil kesepakatan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumbawa yang langsung dipimpin oleh Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID dan Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian TPID pada tanggal 26 September 2018 untuk diimplementasikan dengan instrumen kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pengendalian harga. Kesepakatan rakor TPID antara lain;
  - a. Menyusun Surat Edaran yang menggerakkan partisipasi dan gotong royong seluruh komponen masyarakat dalam gerakan Sumbawa Berdaulat Pangan;
  - b. Menyusun Petunjuk (road map) dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian harga yang terintegrasi dan berkelanjutan;
  - c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TPAPH serta pengembangan SIANDINI sebagai salah satu inovasi tata kelola.

Nota Dinas ini disampaikan sebagai laporan dan pertimbangan bagi Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tindak lanjut penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang sinergis dan terintegrasi bersama aktor-aktor kebijakan lainnya, baik di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, antar kabupaten/kota, dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
 Sekeloa Polakasa Harian TPID,  
  
 Drs. H. BASYIDI  
 NIP. 19890661 1986071 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Garuda No. 1 Telo, (0371) 21582 - Fax: (0371) 25675 Sumbawa Besar

**NOTA DINAS**  
 Nomor: 100/646/2018/E/KON/2018

Kepada Yth. : Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID  
 Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pelaksana Harian TPID  
 Tanggal : 24 Oktober 2018  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Dengan hormat,

Bahwa penyelenggaraan pengendalian harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Hocostrum Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Hocostrum Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Bahwa kedua tim tersebut di atas beresam dalam pengendalian harga Tim Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga (TPAPH) pembantuannya adalah Asisten Perencanaan dan Pembangunan, tentunya adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Analisis perkembangan harga OPD-OPD terkait. Pekejaannya melakukan pemantauan dan analisis perkembangan harga TPAPH diposisikan sebagai tim dan sistem pendukung keputusan bagi TPID dengan rekomendasi kebijakan diajukan ke TPID. Selanjutnya, TPID menyetujui rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada Bupati Sumbawa.

Pembentukan TPAPH berminat dari evaluasi terhadap peran dan fungsi TPID Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekda selaku Sekretaris TPID pada tanggal 26 Oktober 2017. Rapat evaluasi tersebut memberikan evaluasi serta pada saat kelola TPID Sumbawa sebagai forum pengamatan dan integrasi sistem dalam pengendalian harga TPID sebagai perlu ada sinergitas dan terintegrasi sistem dalam pengendalian harga TPID menjadi forum yang efektif dan bermanfaat. Evaluasinya, TPID adalah forum yang strategis, rasional misin kebijakan pengendalian harga.

Hasil evaluasi itu akhirnya menghasilkan adanya inovasi dalam tata kelola TPID yang menekankan pengambilan keputusan dan kebijakan pengendalian harga yang diaktikan menggunakan pengamatan dan informasi keputusan yang akurat dan informasi yang dapat dipercaya sebagai faktor pembentuknya, baik sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur daerah. Inovasi ini diadukan menjadi sistem yang terintegrasi dalam pengendalian data dan program yang ada di seluruh OPD terkait.

Bagian Perencanaan Sekda yang mengawasi urusan inflasi daerah membuat inovasi dan diadukan ke lembaga inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa. Inovasi ini bernama SIANDINI. Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi.

TPAPH menjadi harga dibentuk oleh banyak faktor. Faktor produksi, transportasi, kebijakan pemerintah, penanaman dan penawaran, dolar amerika dan faktor-faktor sosial lainnya. Faktor-faktor inilah yang akan diadukan terhadap harga-harga barang yang dipantau. TPAPH secara khusus ingin membangun tata kelola TPID yang baik, yang kredibel, dan yang akurat di daerah. Harapannya, harga-harga stabil, maka dapat terikat perkembangan harga dapat diprediksi dan kesinambungan masyarakat meningkat.



Penandatanganan Kerjasama Antara Pemkab Sumbawa-Pengelola SRG-Bank BRI-dan Poktan Lopok

Tim Pemantau dan Analisis Perkembangan Harga Sumbawa bersama Dewan Riset Daerah (DRD), setelah mengkaji trend data melalui SIANDINI kemudian menyandingkan dengan data MPP, dirumuskan fokus upaya untuk meningkatkan NTP melalui aktualisasi dan operasional SRG

# PERUBAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK



# PELUANG REPLIKASI

- Setiap Kabupaten/ Kota memiliki TPID yang kondisinya relatif sama. Maka peluang replikasi Si Andini terbuka setidaknya bagi 8 (delapan) Kabupaten di NTB dan meneguhkan Sumbawa sebagai kabupaten percontohan dalam inovasi tata kelola pelayanan publik.
- Aplikasi ini dapat diformat dalam system “*back end*” yang digunakan untuk pengambilan keputusan di TPID dan “*front end*” sebagai info publik. Si Andini bisa direplikasi pada aplikasi lain sebagai DSS dan sebagai instrument transformasi kepada masyarakat.
- Tim SDM yang diperlukan adalah Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga yang cukup ditetapkan melalui SK Bupati

# Kata Mereka...

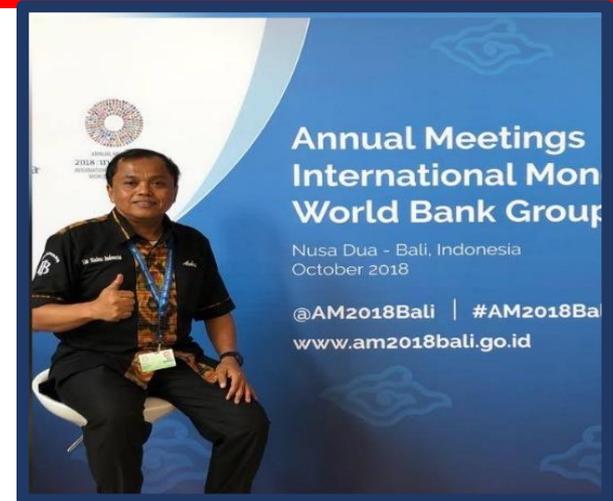


“Saya sudah melihat hasil SIANDINI. Bagi Pengambil keputusan di TPID, Siandini mampu menyajikan data perubahan harga beserta trend masa depan.

Sehingga TPID secara cepat dan tepat menentukan keputusan, dan upaya antisipasi serta menyusun program pengendalian harga yang progresif.

SIANDINI benar-benar menjadi Sistem Pendukung Keputusan”.

**-Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Kadis Perdagangan Provinsi NTB-**



“Saya hadir dalam Rakor TPID Sumbawa. Dengan SIANDINI, proses pembahasan dan pengambilan keputusan di daerah terkait pengendalian inflasi berjalan dengan akurat, cepat dan tepat.

SIANDINI akan dengan mudah direplikasi di daerah lain. Cukup dengan menyesuaikan data dan informasi komoditi yang paling signifikan sebagai penyumbang inflasi di daerah tersebut”

**-Achriss Sarwani. Kepala BI NTB-**

“Daerah lain, yang tidak menjadi lokasi pengambilan IHK oleh BPS, perlu mereplikasi SIANDINI. SIANDINI cocok direplikasi di 8 (delapan) Kabupaten di NTB dan wilayah lain di Indonesia”.

**-Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Kadis Perdagangan Provinsi NTB-**



TERIMA KASIH

Salam Inovasi